



**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH YANG ADA DI KELURAHAN MINTARAGEN KECAMATAN  
TEGAL TIMUR**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pancasakti Tegal untuk  
memenuhi sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjan Ilmu Politik ( S.IP )

Disusun Oleh:

**MAWAS ADE RIGEN PRAYITNO  
NPM. 212060047**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mawas Ade Rigen Prayitno

NPM : 2120600018

Progam Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan Skripsi ini dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH YANG ADA DI KELURAHAN MINTARAGEN KECAMATAN TEGAL TIMUR** adalah benar-benar hasil penelitian kaya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat atau meniru hasil penelitian orang lain yang tingkat kemiripannya 90% dan muncul permasalahan terkait penelitian yang telah dilakukan saya. Maka saya bertanggungjawab terhadap keseluruhan skripsi ini.

Tegal, 21 Agustus 2024

Pembuat Pernyataan



Mawas Ade Rigen Prayitno  
NPM. 2120600047



PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH YANG ADA DI KELURAHAN MINTARAGEN  
KECAMATAN TEGAL TIMUR

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata Satu (S1)  
untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan

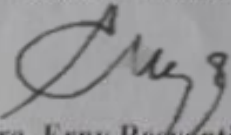
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pancasakti Tegal

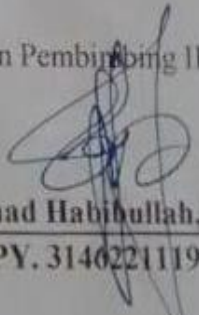
Tegal, 19 Agustus 2024

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing I

  
Dra. Erny Rosyanti, M.Si  
NIPY. 3852391959

Dosen Pembimbing II

  
Akhmad Habibullah, MIP  
NIPY. 314622111994

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



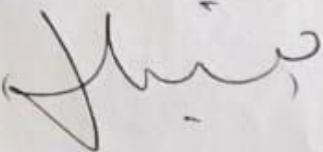
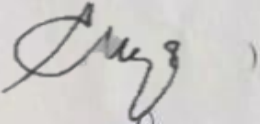

Akhmad Habibullah, MIP  
NIPY. 314622111994

PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBLIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH YANG ADA DI KELURAHAN MINTARAGEN  
KECAMATAN TEGAL TIMUR

Telah dipertahankan dalam sidang terbuka skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal  
Universitas Pancasakti Tegal

Pada Hari : Senin  
Tanggal : 19 Agustus 2024

1. Ketua Dewan Penguji : Unggul Sugi Harto, M.Si (  )  
NIPY. 14251921973
2. Anggota Dewan Penguji : Dra. Erny Rosyanti, M.Si (  )  
NIPY. 3852391959
3. Anggota Dewan Penguji : Akhmad Habibullah, MIP (  )  
NIPY. 314622111994

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal



Unggul Sugi Harto, M.Si  
NIPY. 14251921973

## **MOTO**

‘ Maka sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) , dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap

(QS.Al-Insyirah,5-8)

“ Ketika engkau menyakini bahwa setiap kesulitan ada kemudahan, dan setelah air mata mengalir ada senyuman, maka sesungguhnya kau telah melakukan ibadah yang sangat agung, yaitu berprasangka baik kepada Allah SWT. “

(Habib Umar Bin Hafidz)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, Dan tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas skripsi saya dengan segala kekurangannya, segala syukur ku ucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk karya sederhana ini, maka saya persembahkan kepada :

1. Terimakasih untuk Kedua Orang tua yang yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dukungan baik secara moril maupun materil kepada putranya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepadanya;
2. Terimakasih kepada istriku Laely Nurul Aini,S.PD yang memberikan support dan do'a dalam menyelesaikan skripsi;
3. Terimakasih untuk teman-teman Ilmu Pemerintahan tahun Angkatan 2020 khusus nya kelas C yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan Pendidikan ini;
4. Terimakasih untuk dosen pembimbing yang sudah sangat sabar dalam hal mengarahkan dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan keluarga besar FISIP UPS TEGAL.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Puji syukur kepada Allah Syubhanahu Wata'ala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pada pengikutnya sampai yaumul akhir

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberi bantuan, masukan, dan dorongan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M. Hum. Selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal;
2. Bapak Unggul Sugiharto, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal;
3. Ibu Erny Rosyanti, M.Si selaku dosen pembimbing I yang memberikan bimbingan petunjuk dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini;
4. Bapak Akhmad Habibullah, M.IP selaku dosen pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan hingga

selesai skripsi;

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
6. Ibu Dra. Nany Iestari, M.M selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal serta jajarannya yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Tegal, 05 Agustus 2024

Penulis

Mawas Ade Rigen Prayitno



## ABSTRAK

Nama: Mawas Ade Rigen Prayitno NPM: 2120600047 Judul: **Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah yang ada di Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur**, ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Kota Tegal. Pembimbing I: Dra. Erny Rosyanti,M.Si dan Pembimbing II: Habibullah,M.IP.

Bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi berarti meningkatkan kebutuhan akan makanan, barang dan layanan yang pada akhirnya berdampak pada bertambahnya daya muat, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah urbanisasi yaitu migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, sehingga telah meningkatkan tumpukan sampah di daerah perkotaan. Dengan adanya peningkatan urbanisasi berarti peningkatan kepadatan penduduk, kegiatan industri, perdagangan, dan konsumsi yang lebih tinggi, semua hal tersebut berkontribusi pada jumlah sampah yang dihasilkan Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah yang ada di wilayah Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur dan mengetahui faktor-faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah berbasis 3R yang di kelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal belum sepenuhnya sempurna dan menyeluruh dengan baik. Hal ini terlihat dari kegiatan :

1. Reduce (pengurangan ) Mengurangi sampah yang di dikelola darisampah rumahtangga yang di hasilkan dari tumpukan sampah-sampah menjadi prinsip penting tanpa reduce (pengurangan) pengelolaan sampah tidak bisa berjalan dengan baik, tantanganya dari masyarakat yang masih belum saadar akan kepedulianya terhadap lingkungan
2. Reuse (penggunaan kembali) Sampah yang digunakan kembali seperti botol bekas yang dapat digunakan kembali dengan cara mendaur ulang deperti TPS yang ada di kelurahan mintaragen.
3. Recyling (pendaurulangan )Secara teknis sistem Recyling(pendaurulangan) secara kantong palstik lama terurai, dan tidak bisa di daurulangan Tantangan dalam menerapkan Recyling ( Pendaurulangan) antara lain Infrastruktur yang terbatas Edukasi dan kesadaran masyarakatnya

## DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>I.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>I.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>I.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>I.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>5</b>
BAB II.....	7
LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA .....	7
<b>II. 1 Penelitian terdahulu.....</b>	<b>7</b>
<b>II.2 Kerangka Teori .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Implementasi.....	9
B. Pengertian Kebijakan .....	10
C. Tinjauan tentang Sampah berbasis 3R .....	18
<b>II.3 Definisi Konsep.....</b>	<b>25</b>
<b>II.4 Pokok-Pokok Penelitian .....</b>	<b>25</b>
<b>II. 5 . Alur Pikir .....</b>	<b>26</b>
BAB III .....	27
METODE PENELITIAN.....	27
<b>III.1 Jenis Dan Tipe Penelitian .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Tipe Penelitian .....	28
<b>III.1 Fokus penelitian.....</b>	<b>28</b>
<b>III.2 Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>29</b>
1. Jenis Data .....	29
2. Sumber Data.....	29
<b>III.4 Informan Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>III.5 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>31</b>
1. Observasi.....	31
2. Dokumentasi .....	32
<b>III.6 Teknik dan Analisis Data.....</b>	<b>32</b>
BAB IV .....	35
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN .....	35
<b>IV.1 Gambaran Umum Kota Tegal.....</b>	<b>35</b>

<b>IV.2 Gambaran Umum Kecamatan Tegal Barat</b> .....	37
<b>IV.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal</b> .....	38
<b>IV.4 Visi, Misi dan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup</b> .....	40
<b>IV.5 Uraian Tugas</b> .....	40
1. Kepala Dinas .....	40
2. Sekretariat .....	41
3. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup .....	44
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan .....	45
<u>    </u> Beracun, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup .....	45
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup .....	47
<b>BAB V</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>V.1. Hasil Penelitian</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Reduce ( Pengurangan ) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Reuse ( Penggunaan kembali ) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Reuse ( Penggunaan kembali ) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB VI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>VI.1 Kesimpulan</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>VI.2.Saran</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LAMPIRAN Pedoman Wawancara</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat mempengaruhi daya muat sampah yang merupakan hasil dari konsumsi penduduk (Surjandari et al., 2009). Bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi berarti meningkatkan kebutuhan akan makanan, barang dan layanan yang pada akhirnya berdampak pada bertambahnya daya muat, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah urbanisasi yaitu migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, sehingga telah meningkatkan tumpukan sampah di daerah perkotaan. Dengan adanya peningkatan urbanisasi berarti peningkatan kepadatan penduduk, kegiatan industri, perdagangan, dan konsumsi yang lebih tinggi, semua hal tersebut berkontribusi pada jumlah sampah yang dihasilkan.

Semakin maju perkembangan zaman, maka semakin maju perkembangan pada bidang ekonomi dan teknologi yang telah mendorong masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup konsumtif yang cenderung berlebihan (Hariani & Suprajaka, 2017). Dengan peningkatan konsumsi berarti meningkatnya penggunaan produk, kemasan, dan barang-barang sekali pakai, yang mana semua memiliki kontribusi pada peningkatan sampah. Maka dari hari ke hari sampah akan terus menumpuk dan tentunya di tahun mendatang akan sangat berbahaya dan menjadi ancaman jika tidak ada upaya pengelolaan

sampah yang efisien dan efektif.

Pentingnya pengelolaan sampah yang baik sangat diperlukan namun yang masih menjadi kendala salah satunya yaitu dalam bidang infrastruktur pengelolaan sampah, seperti kurangnya tempat pembuangan akhir yang memadai, kurangnya sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah yang efisien, serta kurangnya fasilitas pemrosesan sampah yang modern menjadi hambatan dalam pengelolaan sampah yang efektif. Faktor lainnya yang tidak kalah penting yaitu pendidikan dan kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang kurang memahami dampak negatif dari perilaku tidak bertanggung jawab terhadap sampah, seperti pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari air tanah dan sungai, menghasilkan gas rumah kaca, dan merusak ekosistem. Selain itu, sampah juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya hama, serangga, dan penyakit.

Jumlah penduduk di Kota Tegal terus menunjukkan kecenderungan peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat jelas melalui data yang terkumpul dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal. Pada tahun 2021 semester I, jumlah penduduk mencapai 287.959 jiwa. Pada tahun 2021 semester II jumlah penduduk mencapai 288,145 jiwa . data di tahun 2021 mengalami penurunan penduduk jiwa tahun berikutnya, yaitu tahun 2022 semester I penduduk mencapai 290.870 jiwa ,pada tahun 2022 semester II

mencapai 290.988 tahun 2021 mengalami peningkatan penduduk jiwa, Pertumbuhan penduduk yang terus berlanjut di Kota Tegal memberikan dampak nyata terhadap peningkatan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

#### VOLUME SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH

Bulan	Volume Sampah (m3) Di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) (M3)		
	2020	2021	2022
Januari	14 258	19 284	15 773
Februari	13 079	17 442	15 021
Maret	14 283	19 477	17 071
April	16 193	18 972	15 975
Mei	17 135	19 561	15 697
Juni	18 058	18 734	16 896
Juli	18 814	18 670	15 195
Agustus	18 013	18 695	16 224
September	18 592	18 392	15 433
Oktober	19 003	19 095	14 735
November	18 424	16 657	14 764
Desember	19 259	17 766	15 710
JUmlah	205 111	222 745	188 494
Volume Sampah (m3) Di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Kecamatan tegal Timur			
<i>Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal</i>			

Peningkatan jumlah sampah ini, seiring dengan pertumbuhan penduduk, memperlihatkan potensi masalah serius terkait pengelolaan sampah di Kota Tegal. Kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya mengolah sampah dengan

benar. Sampah yang seharusnya dapat diolah dan diubah menjadi barang baru dengan nilai ekonomis masih sering dianggap sebagai bahan yang tidak berguna. Oleh karena itu, sampah dari rumah tangga dan kegiatan sehari-hari hanya dikumpulkan dan diangkut ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) serta TPA oleh petugas kebersihan setempat.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk menyediakan fasilitas yang memadai di masyarakat, terutama fasilitas pengolahan dan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Namun, saat ini, pengelolaan sampah di Kota Tegal, khususnya di Kecamatan Tegal Timur, masih mengandalkan pendekatan konvensional atau tradisional. Sampah dikumpulkan di TPS dan kemudian diangkut ke TPA. Sayangnya, proses pemilahan sampah juga belum dilakukan dengan baik, yang mengakibatkan berbagai jenis sampah dicampur aduk tanpa pemisahan yang jelas. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan berbasis penelitian untuk mengembangkan proses pengolahan dan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sebagai solusi potensial, penulis tertarik untuk menjalankan penelitian dengan judul **"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R yang di kelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal"**.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Wilayah Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur dan faktor-faktor apa yang mendukung atau menghambat implementasinya?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah yang ada di wilayah Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah berbasis 3R yang di kelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

## **I.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah serta memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan di dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai sumber rujukan bagi Pemerintah Daerah mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sehingga



pemerintah dapat mengatasi hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut.

- b. Membantu memberikan kontribusi pemikiran dalam mengkaji, memahami serta mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah di Kota Tegal
- c. Memperluas pengetahuan tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Tegal

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II. 1 Penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Berlandaskan penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang hampir serupa dengan peneliti. Dan peneliti akan menjadikan hal ini sebagai acuan yang dapat memperdalam telaah riset penulis nantinya sehingga pada akhirnya dapat diketahui bahwa penelitian penulis memiliki hasil akhir yang tidak sama atau berbeda dengan penelitian terdahulu.

Penelitian pertama berjudul implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian Novia Kencana berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Kencana N, 2017) menemukan bahwa pengelolaan sampah sudah cukup berjalan dengan baik namun belum optimal dikarenakan masih ada beberapa hambatan yaitu partisipasi masyarakat yang kurang, perlengkapan sarana dan prasarana yang belum memadai, dan terbatasnya anggaran/dana.

Penelitian kedua Penelitian Yulianto Mokodompis, Markus Kaunang, Ventje Kasenda berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado (Yulianto Mokodompis dkk, 2019) menemukan bahwa pengelolaan sampah di kota Manado sudah berjalan dengan baik, akan tetapi Masih mengalami kendala yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan keadaan

sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Penelitian Ketiga berjudul implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten tegal ( Khanifah N ,2017 ) menemukan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah sudah berjalan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan isi kebijakan dikarenakan adanya beberapa hambatan yaitu kurangnya anggaran, kurangnya SDM yang ahli di bidang persampahan, masih ada aparat yang melakukan tupoksi di luar peraturan yang ada, dan masih ada pelaksana yang menjalankan tupoksi di luar SOP.

Penelitian ke empat , berdasarkan penelitian Gusrini Yulistia, Margaretha Suryaningsih, Dewi Rostyaningsih berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Gusrini Yulistia dkk, 2015) menemukan bahwa proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah dengan metode 3R dan bank sampah yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan optimal karena kurangnya keikutsertaan dan kurang pedulinya masyarakat terhadap jumlah timbulan sampah.

## II.2 Kerangka Teori

### A. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Menurut Sopiarno (2015:8) istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2008:65) implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian dari implementasi adalah kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya suatu aturan atau kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat / dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Browne dan Wildavsky (dalam Usman, 2002:70), mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan Majone dan Wildavsky di dalam Nurdin Usman mengemukakan implementasi sebagai evaluasi.

Sementara itu, Schubert di dalam Nurdin Usman, mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Usman (2002:70) menambahkan bahwa implementasi adalah sesuatu yang bermuara pada

aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Berbagai pendapat di atas memberikan arahan konsep bahwa Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana 18 kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

## **B. Pengertian Kebijakan**

Secara bahasa atau etimologi, kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:49), diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau garis haluan.

Menurut Steiner dan Miner (2007:22), kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berpikir. Secara lebih khusus kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan suatu

tindakan. Kebijakan mengarahkan tindakan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Kebijakan menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.

Adapun Menurut Lasswell (dalam Sopiando,2015:18), kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi. Kebijakan juga dapat sebagai mekanisme politis, finansial ataupun dalam bentuk apapun. Dalam suatu kebijakan harus selalu di pikirkan matang-matang dalam memiliki suatu keputusan.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan negara berdasarkan kewenangannya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran pemerintah sangat menentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi dimasyarakat akan terselsaikan dengan baik melalui kebijakan yang ditetapkan oleh

pemerintah. Pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat dapat dilihat dari hasil kebijakan yang ditetapkannya.

Perencanaan, penyusunan sampai penetapan kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus mempunyai output yang signifikan dalam penyelesaian masalah yang sedang terjadi. Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang menjabarkan pada masyarakat pelayanan apa yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu.

Carl J Federick (dalam Agustino,2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Penilaian kebijakan banyak dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan. Dampak kebijakan itu mempunyai beberapa macam

dimensi, dimana hal ini harus dipertimbangkan dalam melaksanakan penilaian terhadap kebijakan.

Menurut Islamy (2007:5), kebijakan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang), sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya sehingga policy lebih tepat diartikan sebagai kebijakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata wisdom. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

### **1. Tahapan Kebijakan**

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik untuk membagi proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian ini memudahkan dalam mengkaji kebijakan. Menurut Dunn (dalam Winarno, 2012:36), tahap-tahap kebijakan adalah:



#### a. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

#### b. Formulasi Kebijakan

Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives* atau *policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

#### c. Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

#### d. Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi pemerintahan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

#### e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.

## **2. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Pengertian implementasi sebagaimana dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Sedangkan kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seharusnya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah

### **3. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi**

Menurut Sunggono (2004:39), terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi, yaitu diantaranya:

#### **a. Isi Kebijakan**

Implementasi kebijakan bisa gagal atau tidak berhasil karena masih samarnya isi kebijakan. Maksudnya adalah bahwa apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan

yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana, dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap kegagalan sebuah implementasi kebijakan.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat sulit apabila pada proses pengimplementasiannya tidak cukup memperoleh dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

Penyebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat

penolakan warga masyarakat dalam implementasinya pada akhirnya perlu dilakukan

## **C. Tinjauan tentang Sampah berbasis 3R**

### **1. Pengertian Sampah**

Untuk mengetahui dan mengenal tentang pengertian sampah maka berikut

ini dikemukakan berbagai definisi dan batasan mengenai sampah yang banyak tertulis dalam buku yang bersumber dari beberapa organisasi dan ahli persampahan serta lingkungan, antara lain (Trisna, 2014:4) :

- a. Menurut WHO expert commite, Jhon Pickford- Solid wastes are useless,  
unwanted or discarded material arises from man's activities and not free-following.
- b. Menurut George Tehobanoglous, solid wastes are all that are normally solid and  
and that are discarded as useless and unwanted.
- c. Menurut Tandjung, sampah adalah sesuatu yang tak berguna lagi, di buang oleh pemiliknya atau pemakai semula.
- d. Mandelan, sampah adalah limbah padat yang di buat dari aktivitas Manusia.
- e. Menurut istilah untuk manajemen, Ecolink, sampah adalah sesuatu bahan yang terbuang atau terbuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

- f. Menurut Radyastuti, sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai.
- g. Berdasarkan SK SNI 19-2454, sampah adalah limbah padat yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang sudah di anggap tidak berguna lagi dan terus di kelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.
- h. Menurut Anwar, sampah adalah segala sesuatu yang tidak berguna, tidak bernilai dan tidak di inginkan lagi pada saat dimana pemiliknya membuangnya yang dapat berasal dari hasil aktivitas baik manusia maupun makhluk hidup lainnya namun dapat bernilai pada saat pihak kedua memanfaatkannya.
- i. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka secara sederhana sampah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari kegiatan atau aktivitas manusia atau makhluk hidup lainnya yang berbentuk padat yang tidak di inginkan lagi dan di anggap tidak berguna pada waktu tertentu.

## **2. Klasifikasi Sampah**

- A. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa sampah terdiri atas:

- 1) Sampah rumah tangga, sampah ini berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sampah ini berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- 3) Sampah spesifik. Sampah ini meliputi: sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul tidak secara periodik.

B. Berdasarkan Asalnya Secara umum, jenis sampah berdasarkan asalnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sampah organik dan sampah anorganik (Mallongi dan Saleh, 2015:28):

- 1) Sampah organik

Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, pertanian, perkantoran, dan kegiatan lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Sampah organik itu adalah sampah dari dapur

seperti sisa makanan, sayuran, kulit buah, rempah-rempah dan lain-lain

## 2) Sampah anorganik

Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral, minyak bumi, dan atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagai zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diurai oleh alam, sedangkan sebagian lainnya hanya dapat diurai dalam waktu yang sangat lama. Sampah dalam jenis ini dalam tingkat rumah tangga dalam bentuk botol kaca, botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Kertas, Koran dan karton yang berupa perkecualian.

C. Berdasarkan asalnya, kertas, Koran dan karton termasuk sampah organik. Tetapi karena kertas, Koran dan karton dapat di daur ulang seperti sampah anorganik lain (misalnya gelas, kaleng dan plastik), maka dimasukkan kedalam kelompok sampah anorganik.

D. Berdasarkan sifatnya Secara garis besar sampah dapat di

golongakan sebagai berikut (Mallongi dan Saleh, 2015:28):

### 1) Degradable waste (sampah yang mudah membusuk atau terurai).

Sampah ini dapat diurai secara sempurna oleh proses biologi baik aerob maupun anaerob misalnya: sisa makanan, sayuran, daging dan lain-lain.

### 2) Non-Degradable waste (sampah tidak mudah terurai atau



membusuk) yaitu: plastik, kaleng bekas dan lain-lain. Jenis sampah ini dapat di bagi lagi menjadi:

- a) Recyclable, sampah yang dapat di olah dan digunakan kembali karena memiliki nilai ekonomis seperti plastik, kertas, pakaian dan lainnya.
- b) Non-recyclable, sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau di ubah kembali seperti tetra pacs, carbon paper, thermo coal dan lain-lain.
- 3) Combustable waste (sampah yang mudah terbakar), misalnya kertas, daun-daun kering, dan lain-lain.
- 4) Non-Combustable waste (sampah yang tidak mudah terbakar), misalnya: besi, kaleng bekas, gelas dan lain-lain.

### **3. Pengelolaan Sampah**

Menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan Pembatasan timbulan sampah, Pendaur ulangan sampah, dan Pemanfaatan kembali sampah. Sedang kegiatan penanganan sampah meliputi :

- Pemilahan, dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah.
- Pengumpulan, dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari

sumber sampah ke tempat penampungan sementara / tempat pengolahan sampah terpadu.

- Pengangkutan, yaitu membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah.

Sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, dan pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan yang sebelumnya menuju ke media lingkungan secara aman.

Untuk pengelolaan sampah spesifik menjadi tanggung jawab pemerintah. Saat ini, pengelolaan sampah yang sering digunakan dalam masyarakat adalah 3R (reduce, reuse, recycle) yang berarti pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Dalam Vesilind (2012) menjelaskan mengenai metode pengelolaan sampah sebagai berikut :

1. Reduction (pengurangan)

Pengurangan sampah dapat dicapai dengan tiga cara :

- Mengurangi jumlah bahan yang digunakan dari tiap produk tanpa mengorbankan fungsi produk
- Meningkatkan masa hidup suatu produk
- Mengurangi / menghilangkan kebutuhan penggunaan suatu produk

2. Reuse (penggunaan kembali)

Yaitu menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya (penggunaan barang bekas)

3. Recycling (pendaurulangan)

Proses pendaurulangan membutuhkan pemisahan dari materi yang dapat digunakan dan tidak dapat digunakan. Materi sampah yang dapat didaurulang berupa sampah padat seperti kertas, logam, plastik, kaca, dan sampah dari lahan.

4. Recovery (pemulihan)

Proses ini rata-rata digunakan untuk sampah yang terbuat tidak dari 1 material. Sebagai contoh : kaleng minuman, terbuat dari baja (steel), seng, dan kertas pembungkus pada bagian luar. Proses recovery ini melalui suatu mesin yang dapat memulihkan bagian tertentu dari produk sehingga dapat digunakan kembali.

5. Disposal of Solid Waste in Landfills (pembuangan sampah padat di lahan) Sampah padat disini menjadi bagian dari bahan urugan tanah.

6. Energy Conversion (pengubahan energi) Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh energi dengan penguraian dan pembentukan bahan bakar melalui pembakaran sampah sehingga didapat tekanan / panas.

### **II.3 Definisi Konsep**

Adapun definisi konsep yang diajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap tidak ada perubahan lagi. Subarsono (2008:89).
2. Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.
3. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan Pembatasan timbulan sampah, Pendaaur ulangan sampah, dan Pemanfaatan kembali sampah

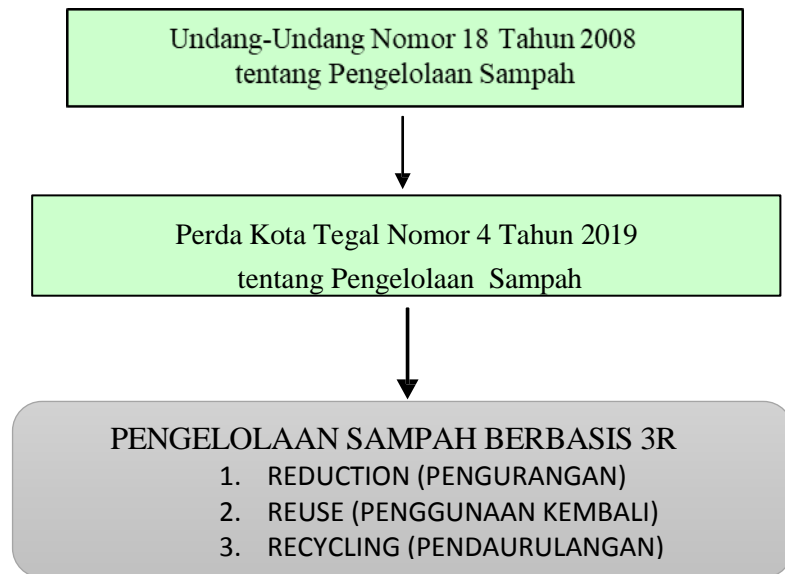
### **II.4 Pokok-Pokok Penelitian**

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dengan berbasis 3R sebagai berikut :

1. Reduction (Pengurangan)

2. Reuse (Penggunaan Kembali)
3. Recycling (Pendaaurulangan)

## II. 5 . Alur Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **III.1 Jenis Dan Tipe Penelitian**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya.

(Sugiyono, 2020) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data, bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa

penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dan memberi gambaran melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Maka peneliti mengambil tipe penelitian Kualitatif dengan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R yang di kelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal.

## **B. Tipe Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya ialah penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Tipe penelitian deskriptif ini juga merujuk pada sebuah penulisan yang menjelaskan situasi sebenarnya mengenai objek penelitian, sesuai dengan keadaan aktual pada saat penelitian dilakukan. Agar diperoleh pengertian metode deskriptif yang lebih jelas berikut dikemukakan pengertian menurut beberapa para ahli antara lain sebagai berikut :Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas .(Sugiyono, 2020)

### **III.1 Fokus penelitian**

Penelitian ini yang berjudul Implementasi Kebijakan pengelolaan Sampah 3R ialah tempat Lokasi penelitian ini dilakukan di Jl. Nila No.11, Tegalsari, Kec. Tegal Barat., Kota

Tegal Peneliti memilih daerah karena ingin mengetahui apakah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal sudah melakukan fungsi sesuai dengan Perda Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah

### **III.2 Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Kualitatif yaitu data hasil wawancara, catatan riset, data observasi yang dibedakan berdasarkan kategori, data komentar customer terhadap suatu produk, dan data lainnya yang tersajikan dalam tulisan.

#### **2. Sumber Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam bentuk data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui : observasi, wawancara, dan kuisisioner.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian yang berasal dari literatur, studi kepustakaan, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.



### III.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat (Sugiyono, 2020). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan unit analisis individu maupun organisasi sehingga dapat valid sesuai dengan realita yang ada dilapangan. Berikut informan tersebut :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN	JENIS DATA
1	Yuli Prasetya, S.Km, M.Kes	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Data primer
2	Untung Pri Wibowo, S.Pi., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup	Data primer
3	Kabul Pamudjo, St	Seksi Pengendali Kerusakan Dampak Lingkungan	Data primer
4	Sutianto, SKM	Pengendali Pencemaran Lingkungan	Data primer

### **III.5 Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Manusia sebagai instrumen pengumpulan data memberikan keuntungan, karena manusia dapat bersikap fleksibel dan adaptif, serta dapat menggunakan keseluruhan alat indera yang dimilikinya untuk memahami sesuatu. Pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) tetapi juga mampu merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini sesuai digunakan apabila penelitian bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan dijalankan pada responden yang jumlahnya tak terlalu besar. Observasi pada dasarnya adalah proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Observasi ini relevan digunakan dalam penelitian kelas yang mencakup pengamatan kondisi interaksi pembelajaran, tingkah laku anak, dan interaksi anak dan kelompoknya. Pengamatan dapat dilaksanakan secara bebas dan terstruktur. Beberapa alat yang bisa digunakan dalam pengamatan adalah lembar pengamatan, ceklist, catatan kejadian, dan lain-lain. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, perasaan. Alasan peneliti melakukan pengamatan adalah

untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu memahami perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu dan memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus (case records) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Berdasarkan analisis dokumentasi ini diharapkan datayang diperlukan menjadi benar-benar valid. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R yang di kelola dinas lingkungan hidup Kota Tegal.

### **III.6 Teknik dan Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Pada penelitian ini penulis akan memaparkan teknik analisis data yang sebagai berikut:

#### **1. Reduksi Data**

Menurut Moleong (2013:37), reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang

yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

## 2. Penyajian Data

Menurut Moleong (2013:37), penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi dapat terorganisasikan dengan baik dan tersusun dalam pola hubungan sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami data penelitian. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (flow chart) dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Moleong (2013:37), langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang

belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap menjadi jelas setelah diteliti. Temuan tersebut dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau teori.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

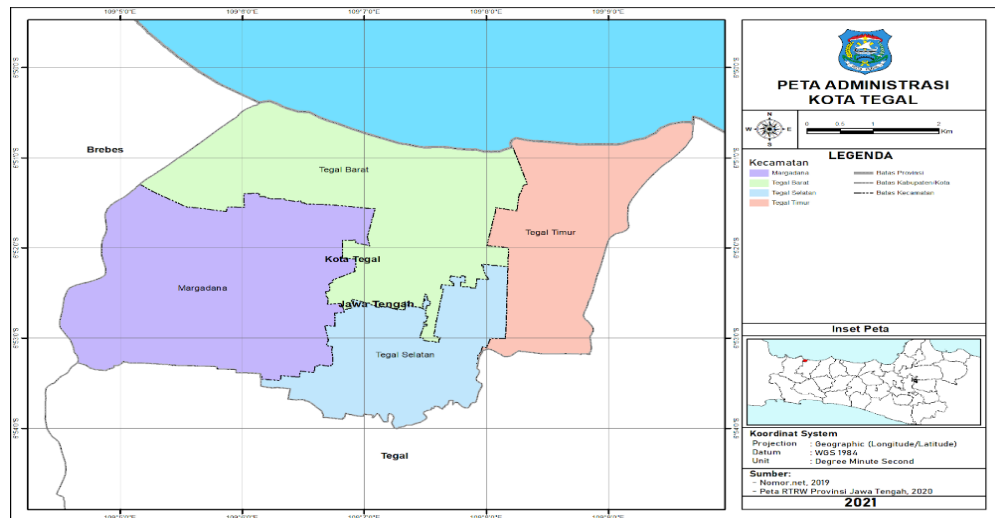
#### **IV.1 Gambaran Umum Kota Tegal**

Kota Tegal merupakan salah satu wilayah di utara Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kota Tegal adalah 39,68 km<sup>2</sup>. Secara administratif batas-batas wilayah Kota Tegal adalah Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Tegal di sebelah timur, Kabupaten Tegal di sebelah selatan, dan Kabupaten Brebes di sebelah Barat.

Secara Administratif terdapat 4 kecamatan di Kota Tegal, yaitu Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Margadana, yang terbagi kedalam 27 kelurahan. Luas kecamatan terbesar adalah Kecamatan Tegal Barat (15,13 km<sup>2</sup>), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tegal Timur (6,36 km<sup>2</sup>).

Berdasarkan astronomis Kota Tegal terletak diantara 109<sup>o</sup>08' – 109<sup>o</sup>10' Bujur Timur dan 6<sup>o</sup>50' – 6<sup>o</sup>53' Lintang Selatan dengan wilayah seluas 39,68 Km<sup>2</sup> atau kurang lebih 3.968 Hektar. Kota Tegal berada di zona pantai utara dan Provinsi Jawa Tengah di zona barat, dengan titik terpanjang 6,7 km dari utara ke selatan dan 9,7 km dari barat ke timur pada peta azimuth. Karena letak geografisnya, Kota Tegal memiliki posisi strategis sebagai pusat ekonomi regional lintas batas di pantai utara Pulau Jawa (Pantura), yang juga merupakan pusat jalur Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya dari barat ke timur. Wilayah tengah dan selatan pulau Jawa (Jakarta, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya) dan sebaliknya.

Gambar 4.1 Peta Adminitrasi Kota Tegal



Sumber : <https://www.tegalkota.go.id>

Kota Tegal juga merupakan salah satu wilayah otonom di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas sebesar 39,68 Km<sup>2</sup> . Secara administrative Kota Tegal di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, di sebelah barat dengan Kabupaten Brebes. Wilayah Kota Tegal memiliki 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Timur, dan Kecamatan Margadana, yang terbagi kedalam 27 Kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Tegal Barat (15,3 Km<sup>2</sup> ), sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tegal Timur (6,36 Km<sup>2</sup> ).

Berada di wilayah Pantura, penggunaan lahan Sebagian besar merupakan lahan bukan sawah yaitu seluas .335 hektar. Dari total lahan bukan sawah tersebut 2719,08 hektar merupakan lahan untuk bangunan dan pekarangan. Luas lahan

yang digunakan untuk sawah hanya 631 hektar dengan pengairan menggunakan pengairan teknis. Kota Tegal berada di Provinsi Jawa Tengah yang berada di wilayah Barat, dengan bentang terjauh Utara ke Selatan 6,7 Km dan Barat ke Timur 9,7 Km. Ketinggian dari permukaan laut ialah + 3 meter di wilayah Utara dan barat, dengan struktur tanah didominasi oleh tanah pasir dan tanah liat. Topografi wilayah ini merupakan dataran rendah dengan hulu sungai ke Laut Jawa dan sedikit wilayah bergelombang dengan ketinggian + 5-10 meter diatas permukaan laut pada bagian Selatan dan Timur.

Dalam pekerjaannya masyarakat Kota Tegal bekerja dalam berbagai jenis diantaranya pedagang, nelayan, buruh industry, PNS, Polisi, TNI dan lain 40 sebagainya. Pemerintah Kota Tegal juga memanfaatkan peluang yang ada untuk kemakmuran dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

#### **IV.2 Gambaran Umum Kecamatan Tegal Barat**

Kecamatan Tegal Barat merupakan basis perikanan se-Kota Tegal. Lusa kecamatan ini 15,13 km<sup>2</sup>, dan berada tepat di pesisir Pantai Utara Pulau Jawa. Mayoritas profesi di kecamatan ini adalah nelayan. Secara geografis Kecamatan Tegal Barat terletak 06.° 857.'058" Lintang Selatan dan 109°128'402" Bujur Timur. Luas keseluruhan Kecamatan Tegal Barat yaitu 15,13 Km<sup>2</sup> , yang terbagi menjadi 7 kelurahan yaitu kelurahan Debong Lor, Kelurahan Kemandungan, Kelurahan Kraton, kelurahan Muarareja, kelurahan pekauman, kelurahan pesurungan kidul, Kelurahan Tegal sari

. Batas wilayah Kecamatan Tegal Barat yaitu sebelah Utara dengan laut jawa, sebelah Timur dengan Kecamatan Tegal Timur , sebelah Selatan dengan



Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Margadana, dan sebelah Barat dengan Kecamatan Margadana dan Kabupaten Brebes. Relief daerah berupa dataran rendah dengan perairan sungai tingginya + 3 meter diatas permukaan laut, struktur tanah nya pasir dan tanah liat, iklim lingkungan nya tropis bersuhu udara panas.

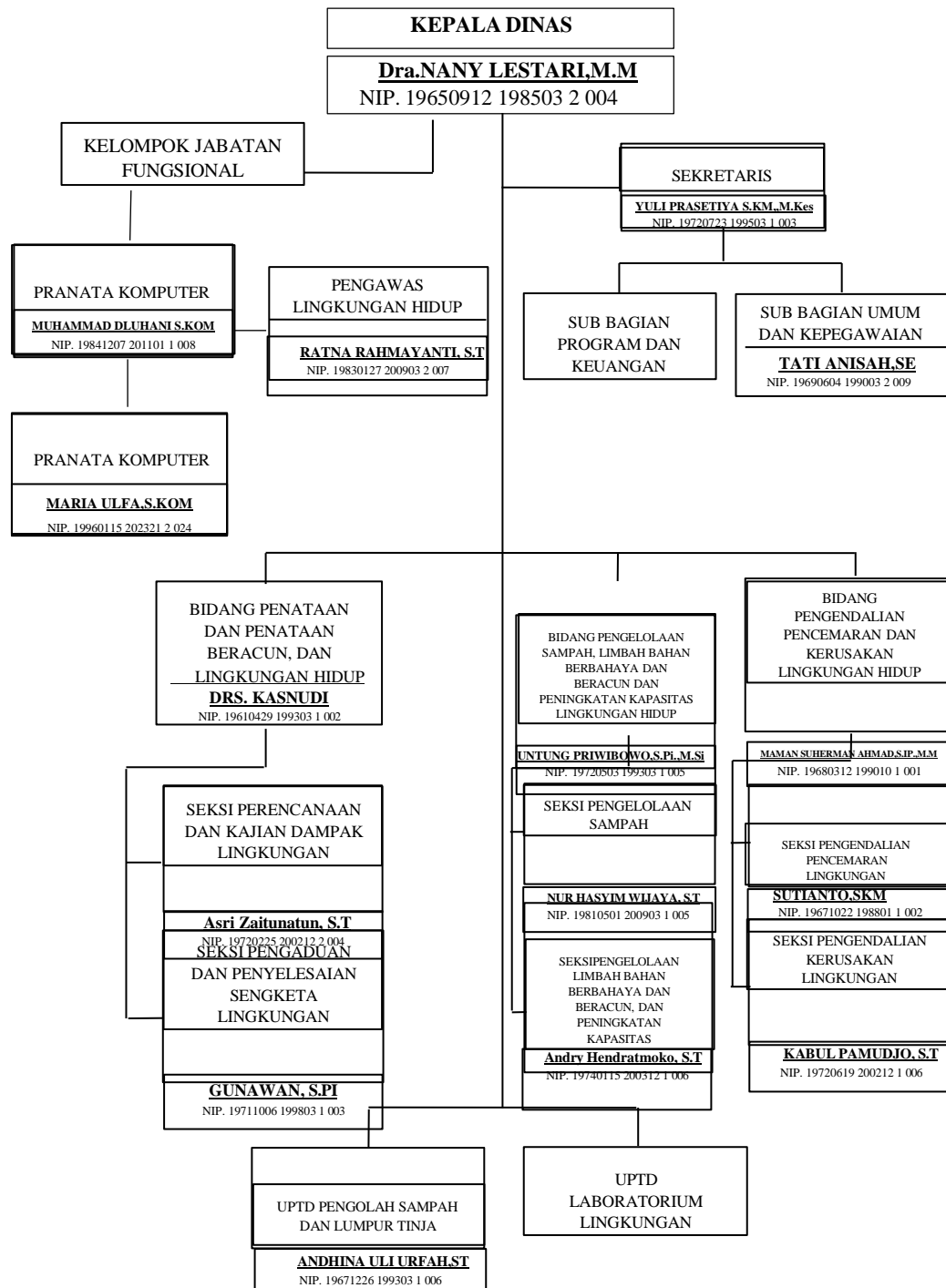
### **IV.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, maka dibentuklah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal merupakan perangkat daerah yang bertugas untuk menjalankan urusan lingkungan hidup. Untuk menjalankan urusannya, Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan struktur organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal dan rincian tugas dan fungsi yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal.



## Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal



#### **IV.4 Visi, Misi dan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup**

##### **1. Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal dalam melaksanakan tugas mengacu kepada rumusan umum Visi Pembangunan jangka menengah daerah Kota Tegal selama lima tahun (2014-2019) adalah sesuai visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

“Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima”.

##### **2. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal**

Meningkatkan kapasitas SDM aparatur, sarana dan prasarana, serta system informasi lingkungan hidup, meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

##### **3. Misi Pemerintah Kota Tegal**

Misi Pemerintah Kota Tegal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah misi yang ke-2, yaitu :

“Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan”.

#### **IV.5 Uraian Tugas**

##### **1. Kepala Dinas**

Tugas : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat**

Tugas : Perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian, meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,

- kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
  - e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
  - f. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
  - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - i. Pelaksanaan fungsi kedinasn lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan

Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyusun program kegiatan;
- b. Melaksanakan monitoring kegiatan;
- c. Menghimpun dan menyusun laporan

kegiatan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Melakukan pengelolaan dan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat badan;

b. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

- Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran badan, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas;

- b. Menyusun pembukuan, pertanggung jawaban keuangan dan pelaporannya;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

### **3. Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup**

Tugas : Perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan dan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pembinaan serta pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah. Fungsi :

- a. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kota;
- b. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan, rencana dan kota;
- c. Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
- d. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- f. Penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah; dan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Tugas : Perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Fungsi :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan penanganan Dan pengelolaan sampah tingkat daerah kota;
- b. Penyusunan perumusan kebijakan pengurangan sampah dari Seluruh sumber timbunan sampah;



- c. Penyusunan rencana penetapan lokasi tempat pembuangan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pembuangan akhir;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. Penyusunan perumusan kebijakan perizinan pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- f. Pembinaan dan pengawasan diselenggarakan oleh swasta;
- g. Penyusunan perumusan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hokum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota;
- i. Perumusan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- j. Pemberian penghargaan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup atau kegiatan yang berwawasan pembangunan berkelanjutan tingkat kota;
- k. Penyusunan rencana perizinan penyimpanan semestara

limbah beracun dan berbahaya (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kota;

- l. Penyusunan perumusan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kota;
- m. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- n. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Tugas : Perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, pengelolaan kawasan konservasi untuk pengendalian dan pengawasan keanekaragaman hayati dan penyelesaian konflik pemanfaatan keanekaragaman hayati. Fungsi :

- a. Penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kota;
- b. Pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- c. Pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; dan
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.